

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realitas politik dewasa ini, persoalan mengenai eksistensi dan keterlibatan perempuan di dalam pembuatan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Politik dinormakan secara luas untuk mampu melibatkan peran serta partisipasi perempuan di dalam prosesnya. Permasalahan perempuan dan juga politik yang sering kali tidak sejalan yang mana problematika utama yang di hadapi oleh perempuan ketika ia turun ke dunia politik. Permasalahan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia politik. Oleh karena itu keterwakilan perempuan dalam politik sangat diperlukan.

Keberadaan keterwakilan kaum perempuan didukung oleh tiga argumen yang menyetujui keberadaan kaum perempuan dalam politik. *Pertama*, terkait dengan keadilan sebagai bagian dari sebuah sistem demokrasi guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. *Kedua*, adanya sisi pragmatis dimana keterwakilan kaum perempuan sebagai alasan politik untuk mencapai kepentingan politiknya. Sehingga kaum perempuan akan cenderung memilih perempuan juga, sehingga hal ini akan meningkatkan jumlah suara partai dengan bersaing dengan lawan politiknya.

Ketiga, dengan adanya kaum perempuan terlibat dalam keterwakilan politik maka akan membawa arah politik yang berbeda pula (Lovenduski, 2008: 52)

Partai politik merupakan sebuah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Tujuan dari partai politik itu sendiri ialah untuk menguasai pemerintah dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum (Ilham, 2013: 15). Berbicara mengenai pemilihan umum dan partai politik berarti kita berbicara mengenai partisipasi masyarakat, di dalam negara yang demokrasi perwujudan partisipasi rakyat merupakan salah satunya adalah dengan mengikuti pemilihan umum dan biasanya aspirasi rakyat ditampung di dalam satu wadah yakni partai politik (Amir, 2013: 15). Keikutsertaan warga negara di dalam pemilihan umum adalah rangkaian kegiatan yang dalam membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih kandidat calon legislatif yang satu dengan yang lainnya (Surbakti, 145: 2010).

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah yang sudah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dalam hal ini akan dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Hal tersebut menjadi momentum yang sangat penting di dalam menyeleksi wakil-wakil yang terbaik untuk bisa menjadi wakil rakyat di dalam parlemen lokal baik itu DPRD Kota/Kabupaten maupun DPD dan DPR RI. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif maka setiap partai politik wajib menyertakan keterwakilan perempuan di dalam nya.

Di bidang politik partisipasi perempuan sangatlah penting, sebab perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berkiprah di dalam dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia terdapat aturan yang mengatur ketelibatan perempuan dalam politik yaitu di antaranya UU No.2 Tahun 2008 memuat sebuah kebijakan mengenai yang mengharuskan setiap partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% di dalam pendirian ataupun kepengurusan partai politik.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik terutama dalam ranah publik khususnya di bidang politik menjadikan partisipasi caleg perempuan di Kota Pangkalpinang sangat memprihatinkan. Partisipasi keterlibatan caleg perempuan dalam partai politik di Kota Pangkalpinang yang masih minim membuat kiprah perempuan di dalam dunia publik pun masih sedikit, itupun masih di dorang agar bisa terlibat langsung meskipun pada dasarnya mereka belum mempunyai dasar pengetahuan akan dunia politik. Adanya keterlibatan caleg perempuan di Kota Pangkalpinang sebagai caleg perempuan dalam politik itu sendiri tidak terlepas dari adanya dorongan-dorongan ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam ranah publik dan juga di sisi lain mereka pun mempunyai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dan harus dicapai dengan cara melibatkan diri di dalam dunia politik.

Pandangan-pandangan masyarakat terkait dengan adanya kaum perempuan yang berkiprah di dalam ranah politik tentunya belum

mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri. Pandangan masyarakat Kota Pangkalpinang terhadap kaum perempuan yang andil dalam ranah politik masih mempunyai anggapan serta respon yang positif ataupun negatif dari sebagian masyarakatnya. Meskipun keterwakilan kaum perempuan mencapai kuota 30% akan tetapi hal tersebut belum bisa membuat masyarakat sepenuhnya memberikan dukungan. Berbagai macam kalangan masyarakat yang masih belum sepenuhnya memberikan dukungan seperti kalangan-kalangan ibu rumah tangga, pedagang, dan bahkan sebagian tim sukses pun belum sepenuhnya mendukung dan memilih calon kandidat tersebut akan tetap, namun dari kalangan seperti pegawai pemerintahan, guru, dan memiliki pemikiran sangat berbeda terkait dengan kaum perempuan.

Meskipun keterwakilan kaum perempuan mencapai kuota 30% akan tetapi hal tersebut belum bisa membuat masyarakat sepenuhnya memberikan dukungan. Berbagai macam tanggapan masyarakat terhadap kaum perempuan yang ikut serta dalam bidang politik, dalam hal ini tidak terkecuali adalah respon serta tanggapan yang masih bersifat belum baik atau negatif terhadap kaum perempuan yang berkiprah di ranah politik. Dunia politik yang dianggap bersifat keras bagi kaum perempuan sehingga dengan demikian ranah tersebut hanya bisa diisi oleh kaum laki-laki. Partisipasi kaum perempuan yang berkiprah di ranah politik masih sedikit. Hal ini tidak lepas dari dukungan yang ada di masyarakat, akan tetapi pandangan-pandangan yang masih menyudutkan serta budaya patriarki yang masih ada sehingga

membuat kaum perempuan tidak percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki.

Seharusnya dengan adanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan bahwa keterwakilan kaum perempuan itu minimal sebanyak 30% bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting kaum perempuan untuk andil dalam dunia politik, namun senyatanya hal tersebut tidaklah berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat terhadap kaum perempuan dan masih saja ditemukan pandangan serta respon dari masyarakat yang bersifat belum positif terhadap kaum perempuan di ranah politik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 banyaknya partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya yakni sebesar 85,74% sedangkan partisipasi laki-laki dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 yakni sebesar 83,41% lebih sedikit bila dibandingkan dengan kaum perempuan. Berdasarkan data tersebut kaum perempuan lebih unggul bila dibandingkan dengan kaum laki-laki, akan tetapi tingkat keterwakilan kaum perempuan itu sendiri lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 yang memiliki 135.368 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 67.341 pemilih dan perempuan sebanyak 68.027 pemilih dan yang mampu menduduki kursi legislatif adalah mayoritas kaum laki-laki (KPU Provinsi Babel: 2019)

Sedikitnya keterwakilan kaum perempuan di Kota Pangkalpinang di karenakan pada umumnya kepengurusan partai politik lebih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Keterwakilan dan penerimaan perempuan dalam pemilu legislatif di Kota Pangkalpinang tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu, banyaknya tanggapan-tanggapan atau pun respon yang berbeda-beda di dalam masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi kaum perempuan dalam meyakinkan hati masyarakat sehingga masyarakat merasa cocok dan bisa diterima didalam masyarakat sebagai wakil rakyat khususnya di Kota Pangkalpinang.

Hambatan serta tantangan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan pada saat terjun secara langsung ke masyarakat, menjadi salah satu faktor masih sedikitnya masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri, sehingga masyarakat lebih sedikit yang memilih kaum perempuan untuk bisa memenangkan kursi legislatif dan lebih memilih kaum laki-laki. Berbagai macam faktor yang bisa dijumpai oleh kaum perempuan saat melakukan pendekatan ke masyarakat, faktor tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun berasal dari faktor eksternalnya.

Berkaitan dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menjadikan topik permasalahan tersebut sebagai kajian penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peluang dan hambatan calon legislatif perempuan di masyarakat perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kota Pangkalpinang Berdasarkan masalah-masalah yang di hadapi kaum

perempuan seperti kurangnya pendidikan politik bagi perempuan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya permasalahan gender, oleh karena itu peneliti mengambil kasus yang ada untuk sebuah penelitian yang berjudul “Perempuan dan Politik (Studi Terhadap Peluang dan Hambatan Calon Legislatif di Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Pangkalpinang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka adapun rumusan masalah yang akan menjadi kajian di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan di ranah politik di Kota Pangkalpinang?
2. Apa saja peluang dan hambatan calon legislatif perempuan dalam mendapatkan akses politik di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari kajian penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan di ranah politik di Kota Pangkalpinang

2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan calon legislatif perempuan dalam mendapatkan akses politik di Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah penulis jabarkan maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi yang baik untuk perkembangan ilmu tentang pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan yang andil dalam bidang politik, yang dalam hal ini kaum perempuan yang menjadi caleg perempuan pada pemilu legislatif yang akan datang dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu sosiologi dan Ilmu Politik.

2. Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang terutama terkait dengan adanya keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan manfaat bagi pemerintah terkait dengan adanya peningkatan dan penguatan partisipasi politik perempuan yang berkiprah partai politik di Kota Pangkalpinang terutama dalam penerimaan caleg perempuan di masyarakat dan perekrutan perempuan dalam partai politik.

E. Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian. Selain itu peneliti akan membahas rumusan masalah yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga bisa ditarik sebuah tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini akan membahas manfaat dari penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Setelah itu dilanjutkan dengan membahas mengenai sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini akan membahas kerangka teori yang dalam penelitian ini menggunakan teori Pieere Bourdiue. Selanjutnya akan membahas mengenai operasionalisasi konsep untuk memberikan batasan arah penelitian agar tidak terlalu luas. Kemudian alur berpikir yang berupa bagan kerangka berpikir agar memudahkan peneliti pada saat penelitian dan yang terakhir pada bab ini akan peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian dilanjutkan dengan objek penelitian yang akan diteliti, sumber data yang terdiri dari sumber data primer

dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data berupa hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi, dan yang terakhir adalah teknik analisis data berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Bab IV berisi gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan memberikan sebuah gambaran mengenai lokasi penelitian gambaran umum Kota Pangkalpinang seperti sejarah Kota Pangkalpinang, jumlah penduduk yang ada di Kota Pangkalpinang, kondisi geografis dan demografis Kota Pangkalpinang, selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial politik di Kota Pangkalpinang dan kiprah politik perempuan di Kota Pangkalpinang.

Bab V pembahasan. Pada bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan di lapangan, seperti bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan bagi pemilih atau masyarakat pada pemilu legislatif 2019 lalu. Selanjutnya yakni membahas mengenai apa saja faktor-faktor peluang serta hambatan yang calon legislatif perempuan di dalam mendapatkan akses politiknya.

Bab VI berisi penutup yang terbagi menjadi dua yakni kesimpulan dan saran yang berisikan uraian pokok-pokok kesimpulan pada penelitian yang dilakukan peneliti dan juga memuat saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.